

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Widiada Gunakaya. 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI.

Agus Dwiyanto. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahmad Mustanir. 2022. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: CV. Qiara Media.

Amin Ibrahim. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Arif Wijanarko. 2022. *Peran Serta dalam Upaya Perlindungan HAM di Indonesia*. Semarang: Mutiara Aksara.

Aulia Sholichah Iman Nurhotimah. 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik (Dalam Perspektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer)*. Yogyakarta: PT. Gava Media.

-----, 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

I Dewa Gede Soni Aryawan ATD. 2020. *Mal Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Mirra Buana Media.



Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

nad Sawir. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan*

Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sigit Dwi Nuridha. 2019. *Penegakan HAM*. Klaten: Cempaka Putih.

Sirajuddin, Anis Ibrahim. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara press. hlm. 33.

Didik Sukrino, sirajuddin dan Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press. hlm. 12.

Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 8.

Jurnal

Annisa Ayu Pratiwi, Zulkifli Aspan, dan Romi Librayanto, 2022, *The Ombudsman Legal System Of The Republic Of Indonesia In The Implementation Of Publik Services*, Tinjauan Hukum Periklanan, Volume 7 Edisi 1, Faculty of Law Tadulako, Palu.

Azmiati Zuliah, Mhd. Asri Pulungan, 2020, *Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Dwiky Lucky Adiyasha, 2023, *Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM)*, Swatantra, Volume XX Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Riyadi, 2008, "*Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Strategi Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan*", Jurnal Wacana Kerja, Volume 11 Nomor 3.

Suri, A.I., Ma'arif, S., Atika, D.B., 2022, "*Efektivitas Layanan Pengaduan Terpusat (Studi Tentang Layanan Pengaduan SP4N Lapor! Kota Metro)*". Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan pelayanan Publik, Volume 4.

Wawancara



Wawancara dengan Bapak Raniansyah, selaku Staf Analis Hukum pelaksana pada Bidang HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pada 8 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Ilham selaku masyarakat awam terhadap

Layanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, pada 15 Oktober 2023 pukul 14.30

Wawancara dengan Ibu Riri selaku masyarakat awam terhadap Layanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, pada 15 Oktober 2023 pukul 14.30

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Website

Balai Permasalahatan Kelas I Surakarta, 2020, "Apa itu Yankomas", Sumber: [Chandra Hamdani Noor, 2023, "Dirjen HAM targetkan dialog HAM ASEAN jadi agenda rutin tiap tahun", Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/3599295/dirjen-ham-targetkan-dialog-ham-asean-jadi-agenda-rutin-tiap-tahun> diakses pada 31 Juli 2023, pukul 11.00 WITA.](https://bapassolo.kemenkumham.go.id/berita-utama/apa-ituyankomas#:~:text=Yankomas%20adalah%20suatu%20kegiatan%20pelayanan,manusia%20yang%20dikomunikasikan%20maupun%20yang%20yang diakses pada 10 Juli 2023, pukul 14.20 WITA.</p></div><div data-bbox=)

Iwan Santoso, et.al, 2020, "MODUL BEST PRACTICE YANKOMAS: EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM Teknis Substantif Bidang Pelayanan Komunikasi Masyarakat", Sumber: https://lcbadiklat-teng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/41_YANKOMAS-EKSISTENSI-EMERINTAH_DITJEN-HAM.pdf diakses pada 11 Januari 2024, pukul 08.00 WITA.



Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020, "Bidang HAM Kanwil Sulsel Ikuti Bimtek Simas HAM", Sumber: <https://s Sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6029-bidang-ham-kanwil-sulsel-ikuti-bimtek-simas-ham> diakses pada 10 Mei, pukul 22.05 WITA.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)", Sumber: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/pelayanan-komunikasi-masyarakat-yankomas> diakses pada 31 Juli 2023, pukul 10.15 WITA.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2023, "SIMAS HAM", Sumber: <https://s Sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/simas-ham> diakses pada 10 Mei, Pukul 22.05 WITA.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, "Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Sumber: https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-pelindungan-hak-asasi-manusia diakses pada 10 Mei 2023, pukul 19.45 WITA.

Singgih Samsuri, 2019, "*Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik*", Sumber: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik> diakses pada 14 Mei 2023, pukul 22.01 WITA.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 587219, 54686. Website: <https://law.faculty.unhas.ac.id>

Nomor 7056/UN4.5.1/PT.00/2023
Lampiran -
Hal PENELITIAN
Kepada
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama	Umi Kalsum
No. Pokok	B021191087
No. HP	0897552386
Prog. Studi	Hukum Administrasi Negara
Alamat	Jl. Beringin Timur Stp 1 No 18
Pembimbing	1. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 2. Anani Anfin, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas.



Approved By: law.informatics@unhas.ac.id on 2023-10-11 08:05:11



Optimized using
trial version
www.balesio.com